

A B S T R A K

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa benda tersebut tetap berada dibawah penguasaan pemberi Fidusia dan yang dialihkan adalah hak kepemilikan benda tersebut atas dasar kepercayaan. Pengalihan pada Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dapat menjadikan kekhawatiran ketika benda tersebut dialihkan, yang seharusnya hanya memberikan hak jaminan kepada kreditur sebagaimana tujuan dari kata “pengalihan” tersebut untuk memberikan pemenuhan hak tagihan atas eksekusi terhadap jaminan. Objek jaminan fidusia berupa benda persediaan yang dialihkan kepada pihak ketiga menimbulkan kekhawatiran pada pihak kreditur terkait risiko yang dapat timbul di kemudian hari jika pengalihan tersebut dilakukan dengan dasar itikad buruk dari pihak debitur. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran pembahasan oleh penyusun dalam tesis ini adalah Karakteristik objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan serta Upaya yang dapat dilakukan kreditur jika Pemberi Fidusia mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Dalam tesis ini penyusun menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Conceptual approach* dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, suatu konsep dibangun untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Penelitian merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan memahaminya melalui pandangan dan doktrin yang ada. Sehingga dalam tesis ini dapat diketahui bahwa karakteristik objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, diketahui pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan dalam hal yang menjadi objek jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap serta upaya yang dapat dilakukan kreditur jika Pemberi Fidusia mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yakni dengan melakukan pendaftaran sebelumnya atas objek Fidusia tersebut.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Benda Persediaan, Dialihkan

Motto

Berusahalah dalam doa dan berdoalah dalam usaha, karena Tuhan selalu bersama hamba-Nya yang senantiasa berusaha dan berdoa kepada-Nya, serta jangan lupa berpikir positif dan optimis, karena hasil tidak mengingkari usaha.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. sebagai Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. sebagai Anggota Tim Penguji Tesis dan Pembimbing Tesis;
5. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. sebagai Anggota Tim Penguji Tesis;
6. Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. sebagai Anggota Tim Penguji Tesis;
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis dan masa studi;
8. Bapak dan Ibu Staff/Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan yang memberikan pelayanan terbaik dalam administrasi;
9. Choirul Anwar, Mas Yuliani, dan Achmad Harris Affandi, S.H., sebagai Orang Tua dan adik saya yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan Tesis ini;

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

10. R. Whinawan Wahyu Pratama, S.H., M.Kn. suami tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal dalam menyelesaikan Tesis ini;
 11. R. Kenzo Adam Whiditama yang selalu memberikan kesempatan sehingga menjadi semangat dalam menyelesaikan Tesis ini;
 12. R. Wirawan Adhi Sasongko, S.E., Dwiana Juliastuti, S.H., dan Rr. Karina Putri Pramitadewi, S.Psi. yang selalu mendukung agar Tesis ini dapat segera terselesaikan;
 13. Rekan-rekan angkatan 2017 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 15 Januari 2020

Penyusun

Dini Ika Ruliani, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.08- PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia